



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2024-2026



<https://dikbud.pangkalpinangkota.go.id>

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan, sehingga **Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Pangkalpinang terpilih periode tahun 2018-2023 pada bulan November Tahun 2023, menjadi titik tolak disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (RPD) yaitu periode tahun 2024-2026. Konsekuensi logis dari tahapan perencanaan pembangunan daerah ini diikuti dengan berakhir pula masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023, dilanjutkan dengan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026, dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (RPD) periode tahun 2024-2026.

Diharapkan, dengan disusunnya Renstra ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dapat lebih memaksimalkan pencapaian kinerja, sehingga dapat mendukung tercapainya salah satu tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD yaitu **Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Semakin meningkatnya IPM, maka mengindikasikan semakin membaiknya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dimana Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menjadi salah satu faktor penting yang sangat menentukan. Semoga dokumen perencanaan ini dapat bermanfaat bagi Kota Pangkalpinang, khususnya untuk kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan di Negeri Serumpun Sebalai yang kita cintai ini.

Pangkalpinang, 11 April 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG,



ERWANDY, S.E., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197207202006041004

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG.....	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.....	28
2.3. Aset / Modal	38
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.5. Capaian Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 Capaian Capaian SPM Jenjang Pendidikan Dasar.....	48
2.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	52
2.7. Tantangan dan Peluang Pengembang Layanan	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	61
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah... ..	70
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	72
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan.....	76
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang	78
3.6. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Pangkalpinang ...	79
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis.....	81

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	82
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD.....	85
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	88
5.1. Strategi	88
5.2. Arah Kebijakan.....	88
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	92
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	92
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	106
BAB VIII PENUTUP	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5.1	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	28
Tabel 2.5.2	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Berdasarkan Golongan	28
Tabel 2.5.3.	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 berdasarkan Jabatan	29
Tabel 2.5.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	29
Tabel 2.5.5.	Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022	30
Tabel .2.5.6	Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Usia di Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2022	30
Tabel 2.5.7	Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022	31
Tabel 2.5.8	Jumlah Tenaga Kependidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2020	31
Tabel 2.5.9	Jumlah PKBM, SKB, dan Lembaga Kursus Kota Pangkalpinang Tahun 2022	32
Tabel 2.5.10	Jumlah Sanggar dan Seni Budaya Kota Pangkalpinang Tahun 2020	32
Tabel 2.5.11	Jumlah Situs/Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Pangkalpinang Tahun 2022	33
Tabel 2.5.12	Jumlah Adat Tradisi Kota Pangkalpinang Tahun 2022	33
Tabel 2.5.13	Data Kondisi Ruang Kelas di Kota Pangkalpinang Tahun 2022	34
Tabel 2.5.14	Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Negeri di Kota Pangkalpinang Tahun 2022	34
Tabel 2.5.15	Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Swasta Di Kota Pangkalpinang Tahun 2022	34
Tabel 2.5.16	Data Sarpras Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	35
Tabel 2.5.17	Data Sarpras Sekolah Negeri Kota Pangkalpinang Tahun 2022	35
Tabel 2.5.18	Dara Sarpras Sekolah Swasta Kota Pangkal Tahun 2022	35
Tabel 2.5.19	Data Jumlah Laboratorium Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2022	36
Tabel 2.5.20	Data Jumlah Labolatorium Sekolah Negri Kota Pangkalpinang Tahun 2022...	36

Tabel 2.5.21	Data Jumlah Labolatorium Sekolah Swasta Kota Pangkalpinang Tahun 2022....	36
Tabel 2.5.22	Jumlah Meja dan Kursi Siswa Sekolah Negeri Kota Pangkalpinang	37
Tabel 2.5.23	Jumlah Meja dan Kursi Siswa Sekolah Swasta Kota Pangkalpinang Tahun 2022	37
Tabel 2.6.1	Asset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	38
Tabel 2.7.1	Capaian Kinerja Pelayanan Melalui Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023	40
Tabel 2.7.2	Capaian Kinerja Tahun 2022	47
Tabel 2.7.3	Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	55
Tabel 2.7.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022.....	58
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.....	62
Tabel 3.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah OPD.....	70
Tabel 3.5	Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang ditinjau dari Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	78
Tabel 4.1	Rumusan Tujuan.....	82
Tabel 4.2	Keselarasn Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	83
Tabel 4.3	Sasaran dan Target Indikator Sasaran.....	84
Tabel 4.4	Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD	86
Tabel 5.1	Keselarasn Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Umum	88
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026	93
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	108

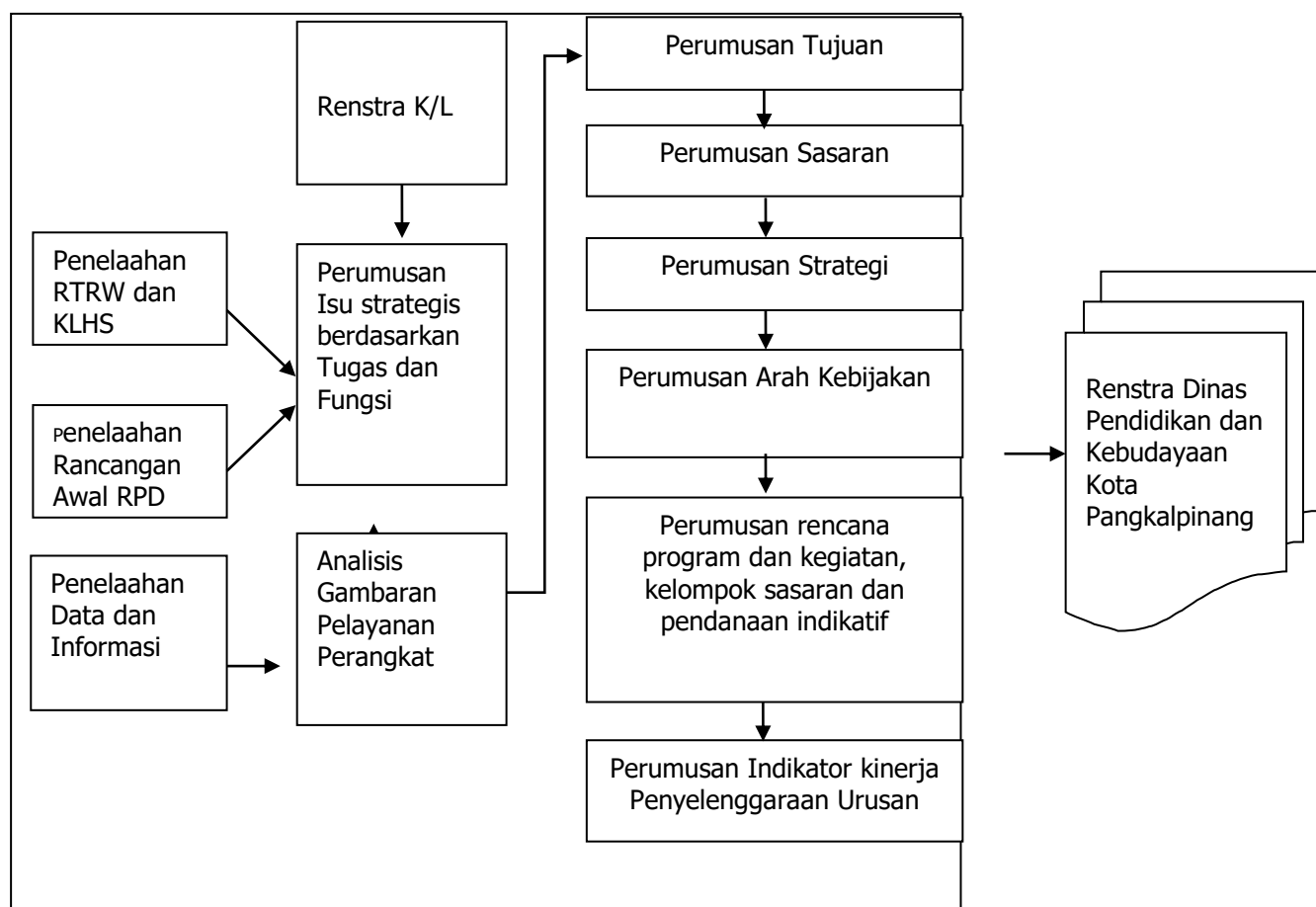
Gambar 1.1.	Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	02
Gambar 1.2	Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	27

1.1. Latar Belakang

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru mengamanatkan bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Berkaitan Intruksi Menteri tersebut, dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Pangkalpinang terpilih periode tahun 2018-2023 pada bulan November Tahun 2023, menjadi titik tolak disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (RPD) yaitu periode tahun 2024-2026. Konsekuensi logis dari tahapan perencanaan pembangunan daerah ini diikuti dengan berakhir pula masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023, dilanjutkan dengan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026, dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (RPD) periode tahun 2024-2026. Dokumen Renstra inilah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2024 hingga tahun 2026.

Surat Edaran Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 27/SE/Bappeda-Litbang/XII/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 Tanggal 26 Desember 2022, menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang merupakan perpanjangan dari RPD Kota Pangkalpinang periode Tahun 2024-2026, mengingat seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang merupakan implementasi pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1.
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama periode RPD yaitu kurun waktu Tahun 2024-2026. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja kurun waktu Tahun 2024 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 555);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
 23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56);
 24. Peraturan walikota nomor 9 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita daerah kota Pangkalpinang tahun 2023 nomor Nomor 144).
 25. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah :

1.3.1. Maksud

- Merumuskan Tujuan, Sasaran, Program serta Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2024-2026, sesuai dengan Rancangan Awal RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

1.3.2. Tujuan

- Menuangkan Tujuan, Sasaran, Program serta Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud di atas ke dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan Latar Belakang penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG;

Menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH;

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**
Menjelaskan Rencana Program Dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.
- BAB VIII PENUTUP;**
Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

**GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pangkalpinang**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang membawahi:

1. Sekretaris;
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis.

Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi unit kerja utama (jabatan Administrator) dibagi habis ke dalam kelompok pelaksana (jabatan Pengawas), sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris, secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1.2. Sub Koordinator Keuangan;
 - 1.3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
2. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 2.1. Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2.2. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2.3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.

3. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 3.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 3.2. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter;
 - 3.3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 4.1. Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 4.2. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
 - 4.3. Seksi PTK Pendidikan Dasar.
5. Tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 5.1. Sub Koordinator Nilai Budaya dan Permuseuman;
 - 5.2. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi
 - 5.3. Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman
6. Tugas khusus, dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 6.1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6.2. Unit Pelaksana Teknis

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi organisasinya berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Adapun fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penetapan rencana kerja dinas
5. pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya pada bawahan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang pendidikan dan kebudayaan
- d. penetapan rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan

- f. pelaksanaan perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membawahi:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal; c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- c. Bidang Pembinaan Ketenagaan
- d. Bidang Kebudayaan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Koordinator Keuangan,
- c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Kepala Sub Koordinator Keuangan

Tugas Pokok :

Melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. **Fungsi :**

- a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Kepala Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pembinaan Pendidikan Dasar kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Dasar
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Dasar
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Dasar
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan dasar
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Dasar
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Dasar dalam kabupaten/kota
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar
- h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan Dasar
- i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Dasar
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Dasar serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- k. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Dasar serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Dasar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
- b. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan karakter
- c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kurikulum dan Penilaian.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan dasar
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar
- f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar.

8. Kepala Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Peserta Didik dan Pendidikan Karakter.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter pendidikan dasar
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Peserta Didik dan Pendidikan Karakter pendidikan dasar
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter pendidikan dasar
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peserta Didik dan Pendidikan Karakter pendidikan dasar
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
- f. pelaporan di bidang Peserta Didik dan Pendidikan Karakter pendidikan dasar.

9. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- b. penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- e. pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

10. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pembinaan Ketenagaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan

- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga budaya lainnya
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:

- a. Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

11. Kepala Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Data Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. penyusunan bahan pembinaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. pelaporan di bidang Data Teknologi Informasi dan Komunikasi.

12. Kepala Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Tenaga Kebudayaan.

13. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar

- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar.

14. Kepala Bidang Kebudayaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Kebudayaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kota
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kota
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kota
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum Kota
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian

- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Nilai Budaya dan Permuseuman
- b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi
- c. Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman.

15. Kepala Sub Koordinator Nilai Budaya dan Permuseuman

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Nilai Budaya dan Permuseuman.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan register nilai budaya dan pelestarian cara budaya, serta permuseuman
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi nilai budaya dan pelestarian nilai budaya
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum
- d. penyusunan bahan penerbitan iizin membawa cara budaya ke luar daerah Kota
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi nilai budaya dan pelestarian nilai budaya serta permuseuman
- f. pelaporan di bidang registrasi nilai budaya dan pelestarian nilai budaya serta permuseuman.

16. Kepala Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup sejarah dan Tradisi.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat
- e. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

17. Kepala Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesenian dan Perfilman.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Kesenian dan Perfilman
- b. penyusunan bahan pembinaan Kesenian dan Perfilman
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Kesenian dan Perfilman
- d. pelaporan di bidang pembinaan Kesenian dan Perfilman.

18. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Tugas Pokok :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam kabupaten/kota
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal
- h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- k. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Seksi Pendidikan Non Formal
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

19. Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan Anak Usia Dini.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan anak usia dini
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Anak Usia Dini
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini
- e. pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

20. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan Non Formal.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Non Formal
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Non Formal

- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Non Formal
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Non Formal
- e. pelaporan di bidang Pendidikan Non Formal.

21. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- b. penyusunan bahan pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- e. pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

22. UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar nonformal dan informal.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional SKB, pelaksanaan peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan belajar nonformal dan informal;

- b. Pelaksanaan operasional SKB meliputi peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan belajar nonformal dan informal;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan SKB.

23. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Taman Kanak-Kanak.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program TK Negeri;
- b. Mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan TK Negeri;
- c. Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di TK Negeri;
- e. Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di TK Negeri;
- f. Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di TK Negeri;
- g. Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di TK Negeri.

24. UPT Sekolah Dasar Negeri

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Dasar.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program SD Negeri;
- b. Mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SD Negeri;
- c. Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SD Negeri;

- e. Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri;
- f. Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa;
- g. Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SD Negeri;
- h. Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SD Negeri.

25. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

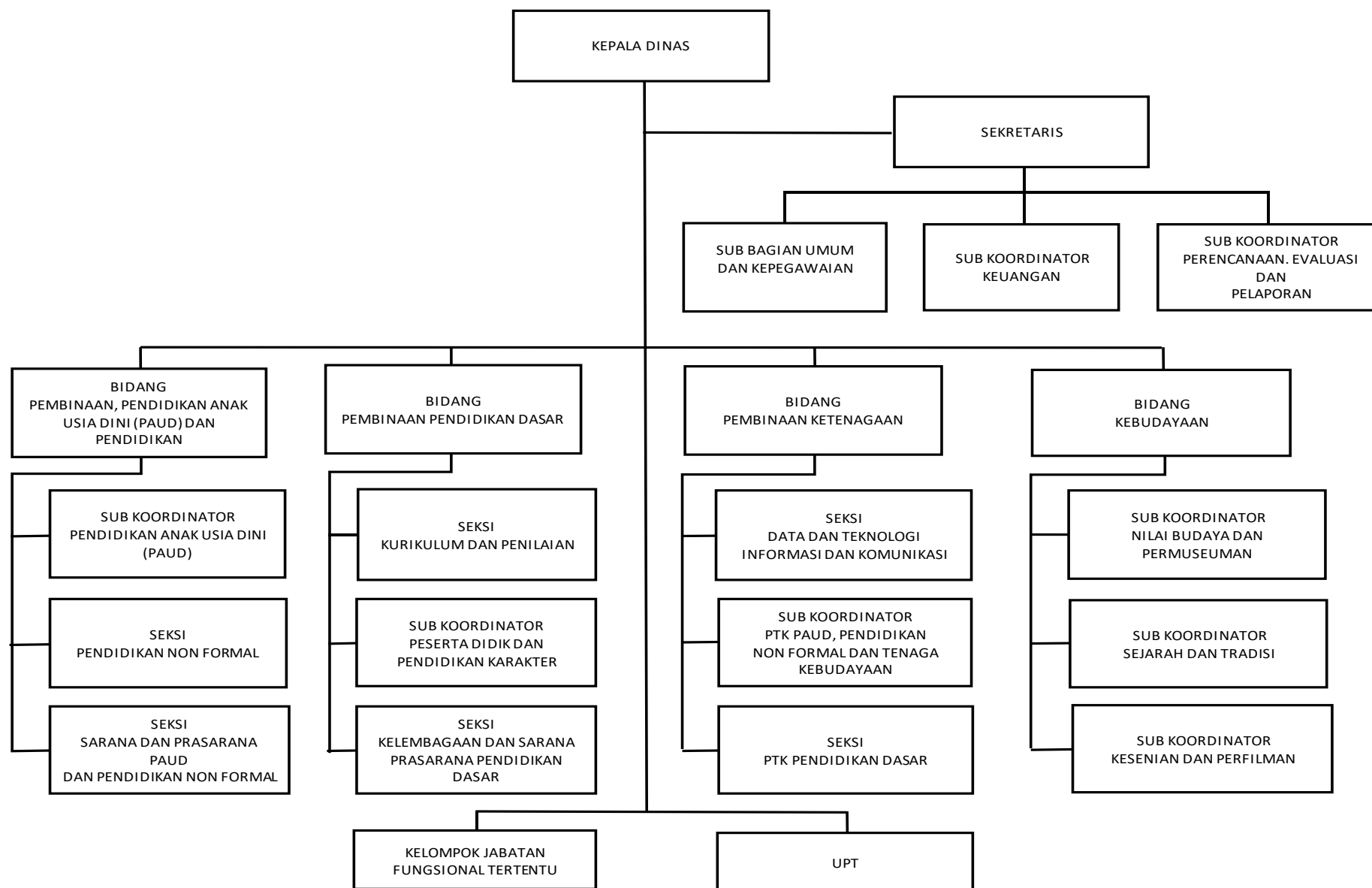
Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Menengah Pertama

Fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program SMP Negeri;
- b. Mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SMP Negeri;
- c. Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SMP Negeri;
- e. Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri;
- f. Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa;
- g. Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri;
- h. Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri.

2.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.5.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	UNIT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64	40	104
2	SKB	10	13	23
3	TK NEGERI	40	15	55
4	SD NEGERI	682	208	809
5	SMP NEGERI	293	64	357
JUMLAH		1.089	304	1.348

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2022

2. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Golongan

Tabel 2.5.2.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022 berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	NON GOLONGAN	-	-	-	-	-
2	I	-	-	-	-	-
3	II	-	-	2	3	5
4	III	7	6	12	18	43
5	IV	7	7	2	-	16
JUMLAH		14	13	16	21	64

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2022

3. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Jabatan

Tabel 2.5.3.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	STRUKTURAL	12
2	FUNGSIONAL UMUM	23
3	FUNGSIONAL TERTENTU	26
4	PHL	41
JUMLAH		102

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2022

4. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.5.4.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	2	PNS	PHL
1	S 3	0	0
2	S 2	11	0
3	S 1	39	19
4	D 3	7	2
5	D 2	0	0
6	D 1	0	0
7	SMA/ sederajat	4	19
8	SMP	0	1
JUMLAH		61	41

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2022

5. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.5.5.
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SKB	1	0	1	9	13	22
2	SPS	0	16	16	0	38	38
3	TPA	0	14	14	0	42	42
4	KB	0	14	14	0	24	24
5	TK	7	57	64	33	265	298
6	SD	66	26	92	621	619	1.240
7	SMP	10	16	26	285	214	499
JUMLAH		84	143	227	948	1.215	2.163

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2022

6. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Usia

Tabel 2.5.6.
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Usia di Sekolah Negeri Dan Swasta
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	USIA				Total
		<30	31-49	50 - 55	>56	
1	2	3	4	5	6	7
1	SKB	3	16	3	0	22
2	SPS	9	21	6	2	38
3	TPA	23	15	4	0	42
4	KB	15	9	0	0	24
5	TK	114	143	34	7	298
6	SD	457	513	140	130	1.240
7	SMP	124	226	90	59	499
JUMLAH		745	943	277	198	2.163

Sumber : Dapodik Tahun 2022

7. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Sekolah Negeri

Tabel 2.5.7.
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								Total
		SMP	SMA/ Sederajat	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SKB	0	1	0	0	0	0	20	0	22
2	SPS	0	22	0	0	1	0	11	0	38
3	TPA	0	33	1	0	2	0	6	0	42
4	KB	0	8	1	1	0	0	11	0	24
5	TK	0	91	4	4	9	1	175	0	298
6	SD	3	100	0	33	7	0	1.065	10	1.240
7	SMP	0	19	2	5	5	0	448	20	499
JUMLAH		3	274	8	43	24	1	1.736	30	2.163

Sumber : Dapodik Tahun 2022

8. Jumlah Data Tenaga Kependidikan Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.8.
Jumlah Tenaga Kependidikan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SKB	1	0	1	2	2	4
2	SPS	0	16	16	0	18	18
3	TPA	0	14	14	0	18	18
4	KB	0	14	14	0	9	9
5	TK	7	57	64	11	106	117
6	SD	66	26	92	69	459	528
7	SMP	10	16	26	35	189	224
JUMLAH		84	143	227	117	801	918

Sumber : Dapodik Tahun 2022

9. Jumlah PKBM, SKB dan Lembaga Kursus Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.9.

Jumlah PKBM, SKB, dan Lembaga Kursus Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	Bentuk Lembaga	JUMLAH
1	2	3
1	PKBM	8
2	SKB	1
3	KURSUS	27
JUMLAH		35

Sumber : Dapodik Tahun 2022

10. Jumlah Sanggar dan Seni Budaya Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.10.

Jumlah Sanggar dan Seni Budaya Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	BENTUK SANGGAR SENI	STATUS SANGGAR		JUMLAH
		AKTIF	NON AKTIF	
1	2	3	4	5
1	Sanggar Tari	10	2	12
2	Grup Dambus	7	4	11
3	Grup Rebana	5	12	17
4	Grup Hadrah	5	1	6
5	Grup Barongsai	1	0	1
6	Grup Teater	1	0	1
7	Grup Musik melayu	1	0	1
8	Grup Seni Suara	1	0	1
9	Sanggar Sekolah	6	0	6
10	Seni Rupa	2	0	2
JUMLAH		39	19	58

Sumber : Bidang kebudayaan DIKBUD Pangkalpinang Tahun 2022

11. Jumlah Situs / Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak Pemerintah Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.11.
Jumlah Situs/Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	BENTUK SITUS/ BENDA CAGAR BUDAYA	JUMLAH
1	2	3
1	Tempat Ibadah	6
2	Museum	1
3	Rumah Sakit	3
4	Pemakaman	6
5	Sekolah	3
6	Tugu	2
7	Gedung/Wisma/Rumah	18
8	Lainnya	7
JUMLAH		46

Sumber : Bidang kebudayaan DIKBUD Pangkalpinang Tahun 2022

12. Jumlah Adat Tradisi Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.12.
Jumlah Adat Tradisi Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	BENTUK TRADISI	JUMLAH
1	2	3
1	Adat Tradisi	45
2	Permainan Rakyat	26
3	Olahraga Tradisi	17
4	Ritus	5
JUMLAH		93

Sumber : Bidang kebudayaan DIKBUD Pangkalpinang Tahun 2022

13. Data Kondisi Ruang Kelas Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.13.
Data Kondisi Ruang Kelas Di Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Tingkat Sekolah	Ruang Kelas Milik menurut kondisi dan Bukan Milik						
	Milik					Bukan Milik	Jumlah Milik dan Bukan Milik
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Sub-Jumlah Milik		
1	2	3	4	5	6	7	8
SKB	4	0	0	0	4	0	4
TK	189	13	0	2	204	26	230
SD	579	111	25	9	724	16	740
SMP	207	45	33	17	302	3	305
Jumlah	979	169	58	28	1234	45	1279

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Tabel 2.5.14.
Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Negeri Di Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Tingkat Sekolah	Ruang Kelas Milik menurut kondisi dan Bukan Milik						
	Milik					Bukan Milik	Jumlah Milik dan Bukan Milik
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Sub-Jumlah Milik		
1	2	3	4	5	6	7	8
SKB	0	0	0	0	0	0	0
TK	19	8	0	0	27	0	27
SD	370	71	25	9	475	0	475
SMP	130	29	21	15	195	0	195
Jumlah							697

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Tabel 2.5.15.
Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Swasta Dikota Pangkalpinang
Tahun 2022

Tingkat Sekolah	Ruang Kelas Milik menurut kondisi dan Bukan Milik						
	Milik					Bukan Milik	Jumlah Milik dan Bukan Milik
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Sub-Jumlah Milik		
1	2	3	4	5	6	7	8
SKB	0	0	0	0	0	0	0
TK	170	5	0	2	177	26	203
SD	209	40	0	0	249	16	265
SMP	77	16	12	2	107	3	110
Jumlah							

Sumber : Dapodik Tahun 2022

14. Data Kondisi Sarana Prasarana Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.16.
Data Sarpras Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Sarana Prasarana		
		Perpustakaan	UKS	Ruang Ibadah
1	2	3	4	5
1	SKB	1	0	1
2	TK	38	50	41
3	SD	79	66	32
4	SMP	20	23	18
JUMLAH		138	139	92

Sumber : Dapodik Tahun 2020

Tabel 2.5.17.
Data Sarpras Sekolah Negeri Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Sarana Prasarana		
		Perpustakaan	UKS	Ruang Ibadah
1	2	3	4	5
1	SKB	1	0	1
2	TK	6	7	5
3	SD	59	47	22
4	SMP	10	9	10
JUMLAH		76	63	38

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Tabel 2.5.18.
Data Sarpras Sekolah Swasta Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Sarana Prasarana		
		Perpustakaan	UKS	Ruang Ibadah
1	2	3	4	5
1	SKB	0	0	0
2	TK	32	43	36
3	SD	20	19	10
4	SMP	10	14	8
JUMLAH		62	76	54

Sumber : Dapodik Tahun 2022

15. Data Jumlah Laboratorium Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.19.
Data Jumlah Laboratorium Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Laboratorium							
		IPA	Kimia	Fisika	Biologi	Bahasa	IPS	Komputer	Multimedia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TK	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SD	14	0	0	0	0	0	15	0
3	SMP	18	0	0	0	8	0	26	5
JUMLAH		32	0	0	0	8	0	41	5

Sumber : Dapodik Tahun 2020

Tabel 2.5.20.
Data Jumlah Laboratorium Sekolah Negeri Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Laboratorium							
		IPA	Kimia	Fisika	Biologi	Bahasa	IPS	Komputer	Multimedia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TK	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SD	5	0	0	0	0	0	5	0
3	SMP	9	0	0	0	6	0	15	3
JUMLAH		14	0	0	0	6	0	20	3

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Tabel 2.5.21.
Data Jumlah Laboratorium Sekolah Swasta Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Tingkat Sekolah	Laboratorium							
		IPA	Kimia	Fisika	Biologi	Bahasa	IPS	Komputer	Multimedia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TK	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SD	9	0	0	0	0	0	10	0
3	SMP	9	0	0	0	2	0	11	2
JUMLAH		18	0	0	0	2	0	21	2

Sumber : Dapodik Tahun 2022

16. Data Jumlah Meja dan Kursi Sekolah Kota Pangkalpinang

Tabel 2.5.22.

Jumlah Meja dan Kursi Siswa Sekolah Negeri Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	MEJA SISWA		JUMLAH	KURSI SISWA		JUMLAH
		LAIK	TIDAK		LAIK	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SKB	0	0	0	0	0	0
2	TK	895	0	895	862	0	862
3	SD	14.138	0	14.138	16.234	0	16234
4	SMP	7.729	0	7.729	8.329	0	8.329
JUMLAH		22.762	0	22.762	25.425	0	25.425

Sumber : Dapodik Tahun 2022

Tabel 2.5.23.

Jumlah Meja dan Kursi Siswa Sekolah Swasta Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	MEJA SISWA		JUMLAH	KURSI SISWA		JUMLAH
		LAYAK	TIDAK		LAYAK	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SKB	0	0	0	0	0	0
2	TK	2.415	0	2.415	3.205	0	3.205
3	SD	5.417	0	5.417	6.633	0	6.633
4	SMP	3.103	0	3.103	3.559	0	3.559
JUMLAH		10.935	0	10.935	13.397	0	13.397

Sumber : Dapodik Tahun 2022

2.3. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berbentuk sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

Tabel 2.6.1

Asset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

No	Kelompok Barang	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Tanah	Rp. 90.163.457.300,00
2	Peralatan Dan Mesin	Rp. 88.866.217.164,38
3	Gedung Dan Bangunan	Rp. 178.200.719.970,25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 6.601.663.083,60
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 8.562.397.769,97
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 2.497.232.211,66
Jumlah		Rp. 118.636.280.319.986

Sumber : Neraca Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2022

Asset/Modal yang dimiliki kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berbentuk sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 2.205 M2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Kosong : 1.775 M2
- Tanah Bangunan Kantor : 430 M2
- Tanah Rumah Dinas : 15 M2

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 2 lantai seluas 494.9 M2 yang terletak di atas tanah seluas 2.205 M2 di Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang.

3. Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas sebanyak 1 buah dengan lokasi : Jln Rasakunda Girimaya Pangkalpinang. Dari 1 rumah dinas tersebut, telah ditempati karyawan.

4. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

5. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2018 :

- a. Mobil Honda Mobilio =1 unit (tahun 2015)
- b. Mobil Suzuki Ertiga =1 unit (tahun 2013)
- c. Mobil Suzuki AVP =1 unit (tahun 2011)
- d. Motor Yamaha Jupiter MX =7 unit (tahun 2008)
- e. Motor Mio Soul =2 unit (tahun 2013)
- f. Motor Yamaha Freego =23 unit (tahun 2019)
- g. Mitsubishi Kuda 3 unit (tahun 2003)

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Pada kedua dokumen tersebut, IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berbeda antara tahun 2018-2020 dan tahun 2021-2023, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

Tabel 2.7.1
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN MELALUI
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023

No	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Capaian Kinerja																		Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
					Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023					
					target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	prediksi	%			
1	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah		1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (0-6)	%	28,45	34,26	120%	50,36%	50,60%	100,5%	50,96%	16,40%	32,2%											
			2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	%				2,03%	2,51%	123,6%	1,96%	3,33%	169,9%											
			3	Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik	%				75,00%	97,80%	130,4%	78,00%	78,00%	100,0%											
			4	Persentase satuan PAUD	%				12,24%	8,27%	67,6%	13,60%	10,09%	74,2%											

No	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Capaian Kinerja															Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
					Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
					target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	prediksi	%
			dan PNF yang terakreditasi A																			
		5	Persentase Capaian SPM PAUD	%				68,50%	NA	NA	100%	71%	71,0%									
2	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar	6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	%				105,93%	102,00%	96,3%	106,99%	110,29%	103,1%									
		7	Persentase Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik	%	65	86,31	133%	87,00%	75,59%	86,9%	88,00%	86,43%	98,2%									
		8	Persentase Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik	%	65	86,31	133%	70,00%	94,19%	134,6%	72,00%	78,63%	109,2%									
		9	Persentase satuan DIKDAS yang	%				56,36%	48,74%	86,5%	58,18%	43,20%	74,3%									

No	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja															Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
						target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	prediksi	%
				terakreditasi A																			
			10	Persentase sekolah hijau (adipiyata) minimal tingkat propinsi	sekolah				6	4	66,7%	8	7	87,5%									
			11	Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	%	0,07	0,02	29%	0,02%	0,02%	100,0%	0,02%	0,08%	400,0%									
			12	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%				0,20%	0,28%	140,0%	0,18%	0,26%	144,4%									
			13	Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	%	96,00	100,00	104%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%									
			14	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama	%	98,75	99,91	101%	100%	100%	100,0%	100%	91,06%	91,1%									

No	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Capaian Kinerja															Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
					Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
					target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	prediksi	%
			(SMP)																			
		15	Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	%	100	98,55	99%	100%	120,70%	120,7%	100%	92,21%	92,2%									
		16	Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	100	100	100%	100%	114,67%	114,7%	100%	104,31%	104,3%									
		17	Persentase Capaian SPM DIKDAS	%				68,50%	NA	NA	100%	111%	111,0%									
3	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	18	Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	45	54,52	121%	37,72%	59,91%	158,8%	39,28%	29,92%	76,2%									
		19	Persentase guru PAUD, PNF yang	%				22,84%	10,55%	46,2%	24,57%	15,48%	63,0%									

N o	Sasaran	Kon disi Kin erja Aw al RPD (20 23)	Indikator Kinerja Utama		SA TU AN	Capaian Kinerja																		Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
						Tahun 2018			Tahun2019			Tahun2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023					
						tar get	reali sasi	%	targ et	reali sasi	%	targ et	reali sasi	%	targ et	realis asi	%	targ et	realis asi	%	targe t	prediksi	%			
				bersertifi kat pendidik																						
			20	Persenta se guru DIKDAS yang berkualif ikasi S1/DIV	%	80	80,4 3	10 1%	93,2 0%	86,8 6%	93,2 %	93,9 1%	89,3 8%	95,2%												
			21	Persenta se guru DIKDAS yang bersertifi kat pendidik	%				45,4 7%	37,0 0%	81,4 %	47,4 7%	40,3 5%	85,0%												
			22	Persenta se Hasil Uji Kompete nsi Guru PAUD Nilai diatas 70	%				19,0 3%	95,0 0%	499, 2%	22,4 9%	95,0 0%	422,4 %												
			23	Persenta se Hasil Uji Kompete nsi Guru DIKDAS Nilai diatas 70	%				13,7 3%	87,6 0%	638, 0%	15,0 3%	87,6 0%	582,8 %												

N o	Sasaran	Kon disi Kin erja Aw al RPD (20 23)	Indikator Kinerja Utama		SA TU AN	Capaian Kinerja																		Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
						Tahun 2018			Tahun2019			Tahun2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023					
						tar get	reali sasi	%	targ et	reali sasi	%	targ et	reali sasi	%	targ et	realis asi	%	targ et	realis asi	%	targe t	prediksi	%			
4	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraa n Pendidikan.		24	Persenta se pengelol aan dan pelapora n dana BOS /BOP	%				100, 00%	82,5 4%	82,5 %	100 %	75,9 5%	76,0%												
5	Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan Permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)		25	Persenta se cagar budaya yang terregist rasi secara nasional	jen is				10	10	100, 0%	12	60	500,0 %												
		26	Persenta se seni budaya yang dilestarik an	jen is				8	8	100, 0%	9	75	833,3 %													
			27	Persenta se sejarah dan tradisi yang dilestarik an	jen is				10	10	100, 0%	11	50	454,5 %												
6	Tersedianya Sistem Tatakelola dan SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan		28	Indeks Kepuasa n Masyara kat	%				75,0 0%	50,7 0%	67,6 %	80,0 0%	49,4 7%	61,8%												

N o	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja															Kondisi akhir kinerja pada akhir RPJMD		
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
						target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	prediksi	%
	prima																						
7	Meningkatnya APM Pendidikan Dasar		29	APM SD	Per sen										88,4	97,84	110,68%	90	90,18	100,20%	91	91	100%
			30	APM SMP	Per sen										65	85,2	131,08%	67	74,08	110,57%	69	69	100%
8	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda		31	Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	jenis										71	71	100,00%	84	66	78,57%	100	100	100%
			32	Persentase Seni budaya yang dilestarikan	jenis										87	87	100,00%	93	78	83,87%	100	100	100%
			33	Persentase Sejarah dan tradisi yang dilestarikan	jenis										50	50	100,00%	75	70	93,33%	100	100	100%

Untuk Tahun 2018, Terdapat 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan dengan 35 indikator. Namun ada beberapa indikator yang tidak digunakan lagi mulai tahun 2019 sehingga pada tabel di atas, yang disandingkan hanya indikator yang beririsan saja dengan tahun 2019-2020. Untuk tahun 2019 – 2020, Terdapat 6 (enam) sasaran yang ditetapkan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk tahun 2021-2023 melalui perubahan Renstra 2018-2023, sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun untuk dasar penyusunan RENSTRA Tahun 2024 – 2026, capaian IKU yang akan dianalisis adalah IKU Tahun 2022 sebagai tahun dasar, sebagaimana dijabarkan berikut:

Tabel 2.7.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya APM Pendidikan Dasar	1.1.1 APM SD	Persen	90,00	90,19	100
		1.1.2 APM SMP	Persen	67,00	74,08	111
2	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1 Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi secara nasional	Persen	84	66	79
		2.1.2 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	93	78	84
		2.1.3 Persentase Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	Persen	75	70	93

Dari tabel di atas, rata-rata capaian Urusan Pendidikan yang diwakili oleh indikator APM SD dan APM SMP sebesar 105,5 persen. Besarnya angka rata-rata capaian ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dari luar Kota Pangkalpinang yang bersekolah di Kota Pangkalpinang pada jenjang SMP. Untuk Urusan Kebudayaan, rata-rata capaian kinerja sebesar 85,3 , yang diukur dari realisasi target kinerja indikator Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi secara nasional, Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dan Persentase Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan.

Pencapaian target kedua sasaran strategis di atas diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Pencapaian target sasaran **"Meningkatnya APM Pendidikan Dasar"**, diupayakan melalui :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) kegiatan;**
2. **Program Pengelolaan Pendidikan, dengan 4 (empat) kegiatan;**
3. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan 1 (satu) kegiatan;**
4. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan 1 (satu) kegiatan.**

Sedangkan pencapaian target sasaran **"Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda"**, diupayakan dicapai melalui :

1. **Program Pengembangan Kebudayaan, dengan 3 (tiga) kegiatan;**
2. **Program Pembinaan Sejarah, dengan 1 (satu) kegiatan;**
3. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan.**

2.5. Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Tahun 2022

Capaian SPM Jenjang Pendidikan Dasar

Target SPM Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sebesar 100 (seratus) % setiap tahunnya. Dengan kata lain, seluruh penduduk usia SD dan SMP di Kota Pangkalpinang dapat berpartisipasi dalam jenjang pendidikan dimaksud tanpa terkecuali. Berikut ini diuraikan capaian SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari capaian SPM SD dan SMP :

Capaian dari target ini diperoleh dengan perhitungan rumus berikut:

Rumus menghitung Capaian SPM Pendidikan Dasar→

$$\% \text{ Capaian SPM} = \frac{\sum \text{siswa umur 7 -15 tahun} + \sum \text{siswa tamat pendidikan dasar}}{\sum \text{penduduk umur 7 – 15 tahun}}$$

Data yang digunakan untuk menghitung rumus di atas adalah data jumlah siswa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Pangkalpinang yang berusia 7 – 15 Tahun, dibandingkan dengan data penduduk Kota Pangkalpinang usia 7 - 15 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (orang)
Siswa SD,MI,SMP dan MTs & Siswa yang tamat SD,MI,SMP dan MTs umur 7 – 15 tahun	32.593
Penduduk umur 7 – 15 tahun	38.850
Yang Belum Terlayani	6.257 (83.39%)

- Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2022 dan Data DISDUKCAPIL Semester II Tahun 2022, diolah.

Berdasarkan data di atas, capaian SPM Pendidikan Dasar di Kota Pangkalpinang Tahun 2022 belum mencapai 100%. Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kota Pangkalpinang sebesar **83.39 %**, di mana terdapat 6.257 penduduk usia 7-15 tahun yang belum/tidak bersekolah pada jenjang yang seharusnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya capaian SPM Pendidikan Dasar di antaranya :

1. Terdapat penduduk dalam rentang usia pendidikan dasar yaitu 7-15 Tahun yang sudah memasuki jenjang pendidikan menengah pada tahun berkenaan, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan capaian SPM Pendidikan Dasar;
2. Terdapat penduduk dalam rentang usia pendidikan dasar yaitu 7-15 Tahun yang tidak berpartisipasi pada jenjang pendidikan formal maupun non formal, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan capaian SPM Pendidikan Dasar.

Capaian SPM Jenjang Pendidikan Kesetaraan

Target SPM Pendidikan pada jenjang Kesetaraan sebesar 100 (seratus) % setiap tahunnya. Capaian dari target ini diperoleh dengan perhitungan rumus:

$$\% \text{ Capaian SPM Kesetaraan} = \frac{\sum \text{siswa kesetaraan umur 7-18 thn} + \sum \text{siswa tamat kesetaraan umur 7-18 thn}}{\sum \text{pend. Umur 7 - 18 thn (tidak pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah)}}$$

Data yang digunakan untuk menghitung capaian berdasarkan rumus di atas adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (orang)
Siswa Kesetaraan & Siswa Tamat Kesetaraan umur 7 – 18 tahun	1.185
Penduduk umur 7 – 18 tahun (tidak pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah)	1.1185

- Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2022 dan Data DISDUKCAPIL Semester II Tahun 2022, diolah.

Jumlah siswa kesetaraan pada jenjang pendidikan Paket A, B dan C di atas adalah siswa dengan usia 7-18 tahun saja. Sedangkan siswa yang berusia di luar rentang usia tersebut tidak diikutsertakan dalam penghitungan. Untuk siswa tamat kesetaraan, data diambil berdasarkan siswa kesetaraan yang tamat pada tahun 2022. Sementara untuk data penduduk umur 7-18 tahun, data yang digunakan adalah data penduduk dengan latar belakang tidak pernah sekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian SPM Kesetaraan di Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebesar **100 persen**. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM kesetaraan di Kota Pangkalpinang sudah tuntas untuk tahun 2022. Di Kota Pangkalpinang terdapat 9 (sembilan) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) baik yang berstatus negeri maupun swasta yang dapat menampung anak-anak yang hendak menuntaskan pendidikan formalnya melalui pendidikan non formal Paket A, Paket B dan Paket C.

Capaian SPM Jenjang PAUD

Target SPM Pendidikan pada jenjang PAUD sebesar 100 (seratus) % setiap tahunnya. Capaian dari target ini diperoleh dengan perhitungan rumus:

$$\% \text{ Capaian SPM PAUD} = \frac{\sum \text{siswa PAUD umur 5-6 tahun} + \sum \text{siswa tamat PAUD}}{\sum \text{penduduk umur 5-6 tahun}}$$

Data yang digunakan untuk menghitung capaian berdasarkan rumus di atas adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (orang)
Siswa Paud dan Siswa Tamat Paud umur 5 – 6 tahun	8.605
Penduduk umur 5 – 6 tahun	3.887

- Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2022 dan Data DISDUKCAPIL Semester II Tahun 2022, diolah.

Berdasarkan perhitungan di atas, capaian SPM PAUD di Kota Pangkalpinang Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar **45.17 persen**. Masih terdapat sebanyak 4.718 penduduk Kota Pangkalpinang usia 5-6 tahun yang belum/tidak berpartisipasi pada jenjang pendidikan Paud. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya capaian SPM PAUD diantaranya adalah :

- 2.3.** Terdapat anak pada rentang usia PAUD (5-6 tahun) yang telah memasuki jenjang pendidikan dasar pada tahun berkenaan, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan SPM PAUD;
- 2.4.** Rendahnya motivasi orangtua murid untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan formal seperti PAUD dan lebih memilih langsung mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan dasar pada saat waktunya tiba;
- 2.5.** Terdapat orangtua murid yang lebih memilih mengikutsertakan anaknya ke dalam pendidikan non formal dengan alasan pendidikan non formal tersebut lebih menawarkan program yang siap pakai dalam rangka persiapan anak masuk ke jenjang pendidikan dasar (contoh: taman pendidikan Alquran, sanggar belajar/les dll).

2.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pada setiap pernyataan kinerja sasaran terdapat indikator kinerja utama yang harus dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menetapkan **2 (dua) sasaran strategis** dengan **5 (lima)** indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Berikut tingkat ketercapaian **2 (dua) sasaran strategis** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama tahun 2022.

❖ Sasaran 1

"Meningkatnya APM Pendidikan Dasar" merupakan sasaran strategis pertama yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran ini dirumuskanlah 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya APM SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pada tahun berkenaan. Semakin besar angka APM menunjukkan semakin besar pula penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya di tahun tersebut.

APM SD dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun yang bersekolah pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2022 pula, kemudian dikalikan 100%. Dengan formulasi perhitungan tersebut, APM SD Kota Pangkalpinang tahun 2022 diperoleh sebesar **90,19%**. Capaian ini meningkat sebesar 106% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar **84,9%**.

APM SD sebesar 90,19% menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 90,19% penduduk Kota Pangkalpinang yang berusia 7-12 tahun telah bersekolah di jenjang SD. Sedangkan sisanya sebesar 9.81% bersekolah tidak pada jenjangnya. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya penduduk yang berusia 7-12 tahun yang sudah bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP), sehingga mengurangi angka pembanding untuk penghitungan APM SD.

2. Meningkatnya APM SMP

Hampir sama dengan APM SD, APM SMP dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa Sekolah Dasar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2022 pula, kemudian dikalikan 100%. Dengan formulasi perhitungan tersebut, APM SMP Kota Pangkalpinang tahun 2022 diperoleh sebesar **74,08%**. Capaian ini meningkat sebesar 114% dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar **65,23%**.

APM SMP sebesar 74,08% menunjukkan bahwa sebanyak 74,08% penduduk Kota Pangkalpinang yang berusia 13-15 bersekolah pada jenjang SMP. Sedangkan sisanya sebesar 25,92% bersekolah tidak pada jenjang yang seharusnya. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya penduduk Kota Pangkalpinang yang berusia 7-12 tahun yang sudah bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA), sehingga mengurangi angka pembanding untuk penghitungan APM SMA.

❖ Sasaran 2

"Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda"

merupakan sasaran strategis kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk mewujudkan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang, dikarenakan budaya benda

dan tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur ketercapaian sasaran ini, telah ditentukan indikator sasaran sebagaimana berikut ini :

1. Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional

Target cagar budaya yang terregistrasi secara nasional pada tahun 2022 sebesar 84%, dengan realisasi sebesar 66%. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 78,6%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

2. Persentase seni budaya yang dilestarikan

Target cagar budaya yang terregistrasi secara nasional pada tahun 2022 sebesar 93 %, dengan realisasi sebesar 78%. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 83,9%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

3. Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan

Target cagar budaya yang terregistrasi secara nasional pada tahun 2022 sebesar 75 %, dengan realisasi sebesar 70%. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 93,3%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan kebudayaan sebesar 71,33%. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2022 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang dinilai cukup memberikan pengaruh pada peningkatan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang. Untuk mengukur efektifitas pelaksanaannya, telah ditentukan pula target Program dan kegiatan setiap tahunnya. Target capaian program dan kegiatan inilah yang nantinya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) ASN perangkat daerah pada urusan Kebudayaan. Adapun capaian target program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7.3
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Penunjang Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda”
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan	%	93	78	84%
	Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	jenis	65	62	92%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan pelestarian sejarah dan tradisi masyarakat pangkalpinang	Event	4	4	100%
	Keg. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Seni Budaya Daerah yang dilestarikan	jenis	27	27	100%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan	Event	30	30	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	jumlah peserta yang mendapat Penguatan Materi Seni budaya	Orang	60	60	100%
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarkan	%	75	70	93%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Keg. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang terregister secara nasional	jenis	5	4	80%
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mendapat Penguatan Materi Sejarah dan Tradisi	Orang	35	35	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah waktu penyelenggaraan pelestarian Sejarah dan Tradisi di Kota Pangkalpinang	Bulan	12	12	100%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarkan	%	84	66	79%
	Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis cagar budaya yang ditetapkan	jenis	60	46	77%
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang Tercatat di Website Register Nasional	Cagar Budaya	5	5	100%
	Penetapan Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya	Cagar Budaya	10	5	50%
	Keg. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	jenis	24	24	96%
	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang mendapat pemeliharaan	Cagar Budaya	4	3	80%
	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Cagar Budaya	1	1	100%

Berdasarkan tabel 3.1.5 tersebut, capaian program pada urusan kebudayaan tidak maksimal pada tahun 2022. Rata-rata capaian ketiga program penunjang urusan kebudayaan tersebut sebesar 85,33%, lebih kecil bila dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 100%. Tidak maksimalnya pencapaian target program tersebut dikarenakan terdapat hambatan di lapangan ketika akan direalisasikan.

Adapun pada bab ini dibahas juga Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022, untuk mengetahui prosentase serapan anggaran serta rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran per program guna menjadi pertimbangan penyusunan program kerja pada Renstra selanjutnya

Tabel 2.7.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022

URAIAN PROGRAM	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun ke-				
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.102.541.957	1.973.329.357	1.746.240.243			2.002.404.859	1.882.261.487	1.684.902.013			95,24%	95,39%	96,49%			NA	-6,00%	-10,49%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	434.352.000	880.399.640	1.468.441.999			418.205.893	841.069.823	1.361.038.063			96,28%	95,53%	92,69%			NA	101,11%	61,82%		
Program Peningkatan Sarana Disiplin Aparatur	65.000.000	135.000.000				57.927.000	134.883.750				89,12%	99,91%				NA	132,85%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		185.000.000	32.500.000				179.492.017	30.400.000				97,02%	93,54%					-83,06%		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.039.700	916.914.237	304.551.676			60.285.300	836.576.620	291.556.600			95,63%	91,24%	95,73%			NA	1287,70%	-65,15%		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.765.468.200					2.694.520.142					97,43%					NA				
Program Penilaian Pengembangan Nilai Budaya	250.000.000					235.441.296					94,18%					NA				
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	348.375.000					307.969.299					88,40%					NA				
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	46.227.203.492					40.948.876.570					88,58%					NA				
Program Keragaman Budaya	548.615.700					532.315.700					97,03%					NA				
Program Pendidikan NonFormal	611.230.000					566.765.000					92,73%					NA				
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	325.000.000					324.159.100					99,74%					NA				
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.324.613.000	16.467.110.700	17.311.700.150			2.456.897.893	16.191.123.690	16.885.438.650			73,90%	98,32%	97,54%			NA	559,01%	4,29%		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	574.054.000					538.103.780					93,74%					NA				
Program Pengembangan Kompetensi Sekolah	50.000.000					37.836.000					75,67%					NA				
Program Sarana Dan Prasarana TIK (Teknologi Informatika)	269.980.000					255.618.200					94,68%					NA				
Program pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda		1.617.000.000	2.173.814.000				1.464.652.500	1.964.712.610				90,58%	90,38%			NA				
Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas		15.989.030.050					14.327.341.932				89,61%					NA				
Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal		763.102.800					753.020.654				98,68%					NA				
Program penyediaan akses dan Mutu layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal			1.742.847.270					1.719.113.012					98,64%			NA				
Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD		435.350.000	521.000.000				418.250.000	462.495.500				96,07%	88,77%			NA	10,58%			
Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)		27.865.895.410	29.607.800.054				22.997.420.699	22.344.537.522				82,53%	75,47%			NA	-2,84%			
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan pendidikan dasar			9.225.104.608					8.825.531.101					95,67%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				127.389.274.118	131.509.779.132				124.283.162.676	126.369.537.459			97,56%	97,56%	96,09%				NA	1,68%
Program Pengelolaan Pendidikan			85.536.326.482	77.364.055.895					67.300.770.795	70.267.237.418			78,68%	78,68%	90,82%				NA	4,41%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			190.999.200	9.600.000					117.375.350	7.200.000			61,45%	61,45%	75,00%				NA	-93,87%
Program Pengendalian Perijinan Pendidikan				9.900.000						9.900.000					100,00%				NA	NA
Program Pengembangan Kebudayaan			519.761.900	2.361.044.051					263.987.850	1.690.319.051			50,79%	50,79%	71,59%				NA	540,30%
Program Pembinaan Sejarah			41.169.800	199.863.400					40.671.000	164.005.500			98,79%	98,79%	82,06%				NA	303,25%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			142.674.200	234.585.200					111.171.600	188.108.350			77,92%	77,92%	80,19%				NA	69,21%

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

2.7.1 Peluang

- a. Letak Kota Pangkalpinang yang strategis sekaligus sebagai ibukota provinsi;
- b. Aksesibilitas transportasi yang baik, angkutan transportasi darat yang lancar,
- c. tersedianya lokasi pelabuhan dan bandara udara yang dekat dan terjangkau;
- d. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi;
- e. Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang
- f. terhadap pengayaan materi ajar.

2.7.2 Ancaman

- a. Keterbatasan APBD di setiap tahunnya;
- b. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, pelanggaran HAKI, penyalahgunaan internet lainnya;
- c. Rawannya peredaran narkoba, minuman keras dan sex bebas yang dapat merambah dan mempengaruhi anak usia sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan
- d. Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah masih dinilai tidak berdampak ekonomi dan tidak penting.

2.7.3 Kekuatan

- a. Undang-undang mengamankan anggaran pendidikan agar dialokasikan sebesar 20 persen dari total anggaran daerah;
- b. Sarana dan prasarana pendidikan yang selalu mengalami peningkatan.
- c. Motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi cukup tinggi.
- d. Meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi.
- e. Tersedianya pedoman pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

2.7.4 Kelemahan

- a. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pend Dasar) belum maksimal;
- b. Implementasi Kurikulum Merdeka belum terlaksana secara maksimal;
- c. erbatasnya ketersediaan pengawas dan penilik sekolah;
- d. Belum maksimalnya penerapan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;
- e. Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal;
- f. Belum Tersedianya Guru Penggerak Jenjang PAUD, dan baru memiliki 2 orang calon guru Penggerak;
- g. Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian tradisi lokal;
- h. Belum optimalnya pembinaan pelaku budaya di satuan pendidikan;
- i. Belum diterbitkannya PERDA tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang;
- j. Belum dimilikinya Gedung Kesenian sebagai tempat berekspresi budaya yang terpadu dan memadai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dapat digali dan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang yang terdapat dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan struktur organisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memiliki 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang terdiri :

- 1.** Bidang Sekretariat;
- 2.** Bidang Pembinaan Dikdas;
- 3.** Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- 4.** Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 5.** Bidang Kebudayaan.

Adapun secara detail, identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Jumlah Bidang = 4 - Jumlah Sekretariat = 1 - Jumlah Seksi/Subbag = 15 PENDIDIKAN FORMAL - Jumlah PAUD/TK Negeri = 8 - Jumlah PAUD/TK Swasta = 89 - Jumlah SD Negeri = 66 - Jumlah SD Swasta = 20 - Jumlah SMP Negeri = 10 - Jumlah SMP Swasta = 16 PENDIDIKAN NON FORMAL - Jumlah PKBM Negeri = 1 - Jumlah PKBM Swasta = 8 - Jumlah LKP = 50 KEBUDAYAAN - Jumlah Sanggar Budaya = 88 - Komunitas Film = 0 - Paguyuban = 22 - Jumlah Cagar Budaya = 46 - Jumlah Kesenian = 8 - Jumlah Tradisi = 26				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik - Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-Undang ASN No. 3 Tahun 2014 Tentang ASN - Permenpan No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya - Permenpan No. 14 Tahun 2010 Tentang Penilik dan Angka Kreditnya - Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan publik - Minimnya SDM yang memiliki sertifikat sesuai kompetensi - Rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan - Rasio penilik tidak sebanding dengan jumlah lembaga binaan - Rasio pamong seni dan budaya tidak sebanding dengan lembaga binaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan - Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pengawas - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi penilik - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pamong seni dan budaya 	a. Sekretariat Belum optimalnya : <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik, pengawas, pamong) - Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pegawai - Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) - Layanan umum sesuai standar pelayanan - Perekrutan pegawai pada jabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam analisis jabatan - Penatausahaan Keuangan Sekolah - Penatausahaan Aset Sekolah - Evaluasi Perencanaan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pend Dasar) belum maksimal</p> <p>Sarana prasarana pendidikan dasar belum optimal</p> <p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal belum mencapai 100%</p> <p>% SD Terakreditasi A baru 33% % SMP Terakreditasi A baru 56%</p> <p>Implementasi Kurikulum Merdeka belum terlaksana secara maksimal</p> <p>SD Negeri dan Swasta yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baru sebanyak 80 %</p> <p>SMP Negeri dan Swasta yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baru sebanyak 50 %</p>	<p>Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan</p> <p>Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana</p> <p>PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan</p> <p>Akreditasi DIKDAS</p> <p>Kurikulum Merdeka</p>	<p>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Sarana Prasarana DIKDAS</p> <p>2. Validitas data kurang memadai</p> <p>3. Pemahaman Peraturan tentang sarana prasarana yang masih rendah</p> <p>Pemenuhan terhadap 28 Indikator Pelayanan Dasar Pendidikan</p> <p>Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Keterbatasan SDM diseksi kurikulum</p>	<p>1. Keterbatasan Lahan dalam pemenuhan sarana prasarana sesuai standar</p> <p>2. Minimnya peran serta masyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas</p> <p>Letak Geografis Wilayah Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Propinsi</p> <p>Rendahnya manajemen Satuan Pendidikan</p> <p>Rendahnya pemahaman tentang kurikulum merdeka pada satuan pendidikan</p>	<p>b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>Belum optimalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) - Angka Literasi dan Numerasi Siswa - Sekolah Terakreditasi A - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru - Pembinaan karakter Peserta Didik - Pengelolaan data PIP dan siswa kurang mampu - Penyediaan dan Pengelolaan Dana BOS - Capaian Kompetensi Siswa dalam Lomba-lomba - Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum DIKDAS - Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran DIKDAS - Pengelolaan Penyelenggaraan Ujian DIKDAS - Sumber Daya dalam melakukan analisis terkait Kurikulum dan Penilaian - Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan DIKDAS - Pembinaan dalam persiapan Akreditasi - Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah - Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan DIKDAS - Pelaksanaan Kurikulum Merdeka - Hasil ANBK

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Hasil Asesmen Nasional belum maksimal</p> <p>Masih rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah PAUD (APS PAUD)</p> <p>Masih rendahnya capaian SPM PAUD</p> <p>Persentase PKBM yang terakreditasi A dan B (0%)</p> <p>Implementasi Kurikulum Lembaga Kesetaraan belum dilaksanakan secara komprehensif</p> <p>Belum Tersedianya Guru Penggerak Jenjang PAUD, dan baru memiliki 2 orang calon guru Penggerak</p> <p>Masih rendahnya Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD</p>	<p>ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer)</p> <p>Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan</p> <p>8 standar pendidikan yang ditetapkan oleh BAN PAUD DAN PNF</p> <p>Standar Proses: Permendikbud no 22 tahun 2016</p> <p>Standar Penilaian: Permendikbud no 23 tahun 2016</p> <p>Standar Isi: Permendikbud no 21 tahun 2016</p> <p>Kriteria Kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak</p> <p>Permendikbudristek No.</p>	<p>Minimnya jumlah guru penggerak</p> <p>Belum maksimalnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan</p> <p>Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Penilik dan Bidang PAUD</p> <p>Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Penilik dan Bidang PAUD</p> <p>Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak</p> <p>Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan proses pendidikan pada satuan pendidikan</p> <p>Kurangnya minat orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD</p> <p>Satuan Pendidikan kurang melakukan promosi</p> <p>Lemahnya Kompetensi dan Pengetahuan Pengelola PKBM terhadap Pemenuhan 8 Standar Nasional</p> <p>Tidak Fokus Pengelola dalam mengelola Lembaga Pendidikan Kesetaraan</p> <p>Rendahnya Kompetensi Pengelola dalam mengelola Satuan Pendidikan</p> <p>Tidak ada Pengembangan Kurikulum di Satuan Pendidikan</p> <p>Rendahnya minat Para Guru untuk mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak</p>	<p>c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</p> <p>Belum optimalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Capaian SPM PAUD - kualitas layanan administrasi terhadap Lembaga PAUD dan Kesetaraan. - Kompetensi pemberi layanan terhadap bidang layanan kepada Lembaga PAUD dan PNF. - Peralatan pendukung layanan yang tersedia. - Penerapan standar yang diberikan kepada Lembaga PAUD dan Kesetaraan. - Pemahaman terhadap sebuah peraturan dan ketentuan yang sudah ada.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tidak adanya Pembinaan Kelembagaan pada pendidikan non formal dalam bentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan	262/M/2022 Perpres Nomor 68 Tahun 2022	Pendidikan Guru Penggerak Tidak dengan jelas disebutkan adanya tugas dan fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dalam melakukan Pembinaan Kelembagaan LKP, dan hanya ada Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Kesenitaraan	Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak Lembaga Kursus dan Pelatihan masuk dalam Rumpun Pendidikan Vokasi yang kewenangannya ada di Tingkat Provinsi	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD 55,51%</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik SD 87,43%</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik SMP 92,35%</p> <p>Tenaga Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik 13,83%</p> <p>Tenaga Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik 42,85%</p> <p>Tenaga Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik 47,43%</p> <p>Tenaga Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak 0%</p> <p>Tenaga Pendidik SD yang memiliki sertifikat Guru Penggerak 0,37%</p> <p>Tenaga Pendidik SMP yang memiliki sertifikat Guru Penggerak 0%</p>	<p>Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</p> <p>Permendikbud No.37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat sampai Tahun 2015</p> <p>Merdeka Belajar Episode ke 5</p> <p>Permendikbudristek No 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah</p> <p>Permendikburistek No 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak</p>	<p>Kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik dalam mengikuti Uji Kompetensi 2. Belum maksimalnya pembinaan oleh Pejabat Fungsional 	<p>Adanya moratorium penerimaan CPNS Tenaga Pendidik</p> <p>Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi Tenaga Pendidik dalam memenuhi kompetensi yang ditetapkan 2. Rendahnya Minat Tenaga Pendidik untuk ditugaskan menjadi Kepala Sekolah 3. Kemampuan Tenaga Pendidik dalam penggunaan TIK yang masih rendah 	<p>d. Bidang Pembinaan Ketenagaan</p> <p>Belum optimalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan disatuan pendidikan - Data pokok pendidikan dan Kebudayaan di Satuan Pendidikan serta lembaga Kebudayaan yang valid - Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik - Pemenuhan Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik - Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta pelaku budaya - Minat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam mengikuti kegiatan PTK Berprestasi - Pendayagunaan TIK (sarana pembelajaran dan bahan ajar) di Satuan Pendidikan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang</p> <p>URUSAN KEBUDAYAAN</p>	<p>Cagar Budaya yang terregistrasi secara nasional 10 situs</p> <p>Jumlah Seni yang dilestarikan 5 jenis Jumlah tradisi yang dilestarikan 9 jenis</p>	<p>Permenbudpar No.PM.13/PW.007/MK/2010 Tentang Benda Cagar Budaya, situs atau kawasan cagar budaya</p> <p>UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Belum tersedianya tenaga ahli cagar budaya</p> <p>1. Belum Terpenuhinya sarana prasarana kesenian 2. Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian tradisi lokal</p>	<p>Perubahan kewenangan pengelolaan kebudayaan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>1. Belum ada Peraturan Daerah tentang Kesenian Daerah 2. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pelestarian tradisi</p>	<p>e. Bidang Kebudayaan Belum optimalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pelaku budaya di satuan pendidikan - Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Budaya - Pemenuhan Komunitas Pecinta Budaya - Ruang Ekspresi Pelaku Budaya - Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
	<p>Persentase Cagar Budaya yang Terregistrasi secara Nasional</p>	<p>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p>	<p>1. Minimnya Kuantitas SDM</p>	<p>1. Nomenklatur Kebudayaan yang digabungkan dengan Pendidikan, mengakibatkan upaya pemajuan kebudayaan sering menjadi kalah dalam hal dukungan penganggaran</p>	<p>e. Bidang Kebudayaan : Belum dimilikinya Gedung Kesenian sebagai tempat berekspresi budaya yang terpadu dan memadai</p>
	<p>= $46/66 \times 100$</p>	<p>Permendikbud No 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya</p>	<p>2. Belum Terpenuhinya Sarana Kerja yang memadai</p>	<p>2. Kendatipun Kebudayaan merupakan Urusan Wajib bukan dasar, dari sisi keberpihakan kebijakan kalah dengan Urusan Pilihan, diantaranya pariwisata, kominfo dll</p>	<p>Belum terdapatnya Manuskrip yang dipegang oleh Masyarakat</p>
	<p>(Objek yang diduga Cagar Budaya Kota Pangkalpinang terverifikasi diregister nasional/ Objek yang diduga Cagar Budaya Kota Pangkalpinang yang terdata X 100)</p>	<p>Permen PUPR No 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan, Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan</p>	<p>3. Belum tersedianya Anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kebudayaan (terutamanya Diklat Pamong Budaya)</p>	<p>3. Belum diterbitkannya PERDA tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang</p>	<p>Kesibukan warga perkotaan dalam urusan mata pencaharian menyebabkan semakin hilangnya budaya untuk melestarikan tradisi</p>
		<p>Permendikbudristek No 28 Tahun 2022 tentang Organisasi</p>	<p>4. Belum Lengkapnya Bidang Pamong Budaya yang dimiliki</p>	<p>4. Kurangnya kepedulian dan peran serta Masyarakat dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kota</p>	<p>Minimnya Tata Kelola Lembaga Kebudayaan</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Tata Kerja Museum dan Cagat Budaya		Pangkalpinang	
			5. Belum tersedianya Tenaga Pengkaji	5. Belum diterbitkannya Regulasi tentang Muatan Lokal di Sekolah	Minimnya jumlah penutur
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	6. Belum tersedianya Tim Penilai Pamong Budaya	6. Masih ada anggapan bahwa tugas pemajuan Kebudayaan Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bidang Kebudayaan saja	Belum adanya Balai Pelatihan Menenun Cual di Kota Pangkalpinang
	= $8/10 \times 100$	PP No 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		7. Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah masih dinilai tidak berdampak ekonomi dan tidak penting	Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kerajinan dan kuliner khas Pangkalpinang
	(Pelaksanaan Pelestarian OPK Kota Pangkalpinang/OPK sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2017 X 100)	Perpres No 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan		8. Belum adanya Kalender Tahunan Event Kebudayaan yang pasti/tetap	Belum tersistematiknya materi muatan lokal pada sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan sekolah menengah.
		Permendikbudristek No 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan			Tergesernya permainan rakyat dan olahraga tradisional oleh Gedjet
					Minimnya regenerasi pemimpin budaya spiritual
					Kurangnya SDM Tenaga Ahli Budaya
					Minimnya Tenaga Ahli Seni Tradisi

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Perumusan Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus selaras dan menunjang tujuan dan sasaran daerah. Tujuan daerah berupa "Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing", didukung oleh tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa "Meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Diharapkan dengan semakin lamanya seseorang menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan usianya, maka kualitas hidup dan kesejahteraannya akan meningkat di masa yang akan datang. Sedangkan sasaran daerah berupa "Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat", didukung oleh sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa "Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP.

Tabel 3.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dan OPD

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SA SARAN KOTA	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SASARAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
									2024	2025	2026	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA						78,57	78,88	89,31	80,72	80,72
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	INDEKS PENDIDIKAN	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah			tahun	10,13	10,17	10,2	10,25	10,25
				Harapan Lama Sekolah			tahun	13,16	13,2	13,25	13,28	13,28
					Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	APS SD	%	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0
			APS SMP		%	98,90	90,00	90,20	90,25	90,25		
			Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan		%	100	100	100	100	100	

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KOTA	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SASARAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
									2024	2025	2026	
						Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	%	61%	70%	80%	91%	91%
						Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	%	60%	70%	80%	90%	90%

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sehubungan tugas tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal urusan pendidikan dan kebudayaan sudah semestinya mengacu kepada tujuan strategis kementerian terkait, agar pemajuan pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara selaras, sejalan, dan berkesinambungan mulai dari daerah hingga ke pusat. Untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dijabarkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kewenangannya mendukung pemajuan pendidikan di ranah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan, serta pembinaan sejarah, pengembangan kebudayaan serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

3.3.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Penentuan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditentukan berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

Visi di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan,

bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama:

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
- 2) Berkebinekaan global Pelajar
- 3) Bergotong royong
- 4) Mandiri
- 5) Bernalar
- 6) Kreatif

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewarganegaraan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai - nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Dalam upaya mendukung visi Kemendikbud tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menyusun rencana pemajuan kebudayaan di Kota Pangkalpinang melalui upaya-upaya berikut :

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya di Kota Pangkalpinang;
2. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya di Kota Pangkalpinang;
3. Pembinaan Sejarah Lokal dalam Kota Pangkalpinang;
4. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Pangkalpinang;
5. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota Pangkalpinang.

3.3.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Presiden, sesuai tugas dan kewenangannya Kemendikbud melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

3.3.3 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud menetapkan lima tujuan diantaranya :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan;
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan tujuan Kemendikbud di atas yang diupayakan untuk memaksimalkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di seluruh daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang juga menetapkan tujuan yang mendukung tujuan dimaksud dengan upaya:

1. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah.
2. Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda.

3.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Sasaran Strategis Kemendikbud ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan sasaran stretegis Kemendikbud dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang telah menetapkan sasaran berupa meningkatnya harapan dan rata-rata lama sekolah, serta meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan pendidikan dan kebudayaan dituangkan dalam Visi Presiden 2020-2024, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun perwujudan visi dimaksud berupa “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**. Dengan memegang prinsip pengarusutaman *Sustainable Development Goals (SDGs)*, perumusan misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mensukseskan pencapaian misi, Presiden telah menetapkan arahan-pembangunan. Pada misi yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, Presiden menetapkan arahan pembangunan melalui strategi pencapaian **"Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)"**, dengan memperkuat penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, dimana **aspek pendidikan** termasuk salah satu diantaranya. Selain penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, upaya pembangunan karakter juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi peningkatan kualitas manusia Indonesia, dimana **pemajuan dan pelestarian kebudayaan** menjadi salah satu langkah strategis di dalamnya. Adapun salah satu target pembangunan pendidikan yang ditetapkan Presiden hingga tahun 2024 adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,18 tahun. Ini berarti, ditargetkan seluruh penduduk pada usia dimaksud dapat melampaui jenjang pendidikan menengah hingga tuntas. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan juga ditargetkan mencapai 62,7 persen.

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian misi, Presiden juga telah menetapkan **7 (tujuh) agenda pembangunan**, dimana dua di antaranya mewakili upaya peningkatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yaitu **"Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"** serta **"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"**. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas, sedangkan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pembangunan etos kerja.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang

Pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pangkalpinang khususnya PAUD, PNF dan DIKDAS selama 5 (lima) tahun ke depan (s.d. Tahun 2023) berkaitan dengan RT/RW Kota Pangkalpinang guna mewujudkan pembangunan unit sekolah baru, sehingga berkaitan dengan penggunaan tata ruang dan lingkungan hidup.

Tabel 3.5.
Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup
Faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang ditinjau dari implikasi kajian lingkungan hidup strategis.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Daerah rawan bencana	Beberapa satuan pendidikan terletak di daerah rawan banjir	Sulit untuk mengalokasikan rehabilitasi sekolah yang terkena bencana dengan cepat	Telah dilakukan mitigasi bencana di daerah rawan bencana

Jika mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang terkait dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pangkalpinang, maka secara Tata Ruang dan Wilayah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak ada Kendala dan Hambatan, jadi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada jenjang diatas dapat dibangun dimana saja, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan daya tampung dan daya dukung wilayah yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB).

3.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Pangkalpinang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang harus disusun dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB yang harus didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersurat pada Tujuan ke-1 (satu) dan Tujuan Ke-4 TPB sebagaimana dijabarkan berikut :

A. Tujuan Ke-1 (satu) TPB

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro

B. Tujuan ke-4 (empat) TPB

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara , dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
3. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan;
4. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi;
5. Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun;

Adapun untuk mewujudkan tujuan – tujuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang telah mengintegrasikan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Dokumen Perencanaan Jangka Mengengah atau dalam Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 secara tersirat maupun tersurat, diantaranya:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat;
3. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran;
4. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika;
5. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;
6. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat;
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
9. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun;
10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;
12. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat;
13. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMA/SMK/MA/ sederajat;
14. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun;
15. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun;
16. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH));
17. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Ketujuh belas indikator tersebut diupayakan meningkat capaiannya hingga tahun terakhir Renstra. Dengan menjalankan ketujuh belas indikator tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra, diharapkan tujuan TPB dapat terwujud sesuai dengan yang telah ditargetkan.

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, telaah terhadap renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaah terhadap RTRW dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dapat ditentukan isu-isu strategis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- 1.** Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD (capaian APM SD Tahun 2022 sebesar 99,7);
- 2.** Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP (capaian APS SMP Tahun 2022 sebesar 98,90);
- 3.** Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk periode tahun 2024 – 2026, dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran menengah Kota Pangkalpinang. Tujuan dan sasaran perangkat daerah diupayakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah, dengan memperhatikan isu strategis penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah. Pernyataan Tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun sebagai ringkasan atas sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD (capaian APS SD Tahun 2021 sebesar 99,7 persen); ➤ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP (capaian APS SMP Tahun 2021 sebesar 98,9 persen); 	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang. 	Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda

Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah **Meningkatnya APS Pendidikan Dasar**, dengan indikator APS SD dan SMP. Berdasarkan data capaian terakhir isu strategis, APS SD dan SMP Tahun 2021 masing-masing sebesar 99,7 dan 98,9 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua anak usia sekolah SD dan SMP yang bersekolah pada jenjang tersebut. Hal ini tentu

menjadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pangkalpinang. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda adalah **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda**, dengan indikator Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Benda.

Tabel 4.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	<i>APS SD</i>
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah		1.1.2.	<i>APS SMP</i>
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	2.1	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	<i>Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional</i>
					2.1.2	<i>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan</i>

Secara lengkap sasaran serta target Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Sasaran dan Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	TARGET KINERJA SASARAN		
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
						Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	<i>APS SD</i>	<i>persen</i>	99,70	99,80	99,90
			1.1.2.	<i>APMSSMP</i>	<i>persen</i>	98,90	90,00	90,2
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	<i>Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional</i>	<i>persen</i>	61	70	80
			2.1.2	<i>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan</i>	<i>persen</i>	60	70	80

Untuk urusan kebudayaan, target indikator sasaran yang ditetapkan berupa persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional;
Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah cagar budaya yang direncanakan akan diregistrasi secara nasional berjumlah 46 unit. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2024 hingga tahun 2026.
2. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan;
Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kota Pangkalpinang ditargetkan sebanyak 10 jenis. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2014 hingga tahun 2026.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dengan Tujuan dan Sasaran pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 :

Tabel 4.4.
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD

RPJMD							RENSTRA					
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter	Optimalisasi wajib belajar sampai tingkat SLTA Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1	APS SD
						Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan						
						Pemberian beasiswa siswa berprestasi						
						Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik						
						Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda	2.1	Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	Persentase Cagar Budaya yang Terregistrasi Secara Nasional
		2.1.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan									

Dari tabel di atas, tercantum tujuan daerah berupa "Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender", dengan sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan". Dengan demikian, formula tujuan perangkat daerah untuk mendukung ketercapaian tujuan daerah dirumuskan sebagai berikut "Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah", dan "Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda" dengan sasaran "Meningkatnya APS Pendidikan Dasar" dan "Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda". Diharapann dengan meningkatnya waktu lama bersekolah, maka kualitas pendidikan akan tercapai maksimal.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan cara yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan prima dan berkualitas kepada masyarakat;
2. Meningkatkan Akses Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan;
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Paud, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan;
4. Mengurangi Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Angka Melanjutkan Sekolah Siswa Paud, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidik Paud, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan;
6. Peningkatan Cagar Budaya yang teregistrasi secara Nasional;
7. Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk memudahkan implementasi dari strategi yang telah dirumuskan di atas, telah diformulasikan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	Meningkatnya APM Pendidikan Dasar	1. Memberikan layanan prima dan berkualitas kepada masyarakat	1. Penyediaan sarana prasarana aparatur 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Penyediaan administrasi perkantoran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
			2. Meningkatkan Akses Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru; 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru; 3. Pembangunan Pagar Sekolah; 4. Pembangunan Ruang Guru; 5. Pembangunan Sarana Bermain; 6. Pembangunan Ruang UKS; 7. Pembangunan Perpustakaan; 8. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary; 9. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir, 10. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat Melalui Bunda PAUD.
			3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan	1. Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 2. Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD 3. Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP 4. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD dan PNF 5. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) DIKDAS

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
			4. Mengurangi Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Angka Melanjutkan Sekolah Siswa Paud, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	1. Pemberian Beasiswa Miskin (SD), dan perlengkapan belajar 2. Pemberian Beasiswa Miskin (SMP), dan perlengkapan belajar 3. Penyelenggaraan USBN dan US SD, Melaksanakan Implementasi Kurikulum, Melaksanakan Implementasi Penilaian, Penyusunan Kisi-Kisi USBN, Melaksanakan Pendidikan Karakter, Melaksanakan Lomba-Lomba Siswa SD, Pemberian Beasiswa Prestasi SD 4. Penyelenggaraan UN dan US SMP, Melaksanakan Implementasi Kurikulum, Melaksanakan Implementasi Penilaian, Penyusunan Kisi-Kisi UN, Melaksanakan Pendidikan Karakter, Melaksanakan Lomba-Lomba Siswa SMP, Pemberian Beasiswa Prestasi SMP 5. Pemenuhan Pelayanan Dasar bidang Pendidikan 6. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Ujian Paket A, Paket B, Paket C) 7. Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
			5. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pendidik PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Beasiswa Peningkatan Kualifikasi, Pengelolaan GTK PAUD 2. Pelaksanaan Pendidikan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Pendidik PAUD, Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru PAUD. 3. Pemberian Beasiswa Peningkatan Kualifikasi, Pengelolaan GTK DIKDAS 4. Pelaksanaan Pendidikan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Pendidik DIKDAS, Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru DIKDAS. 5. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD, Penilaian Angka Kredit Guru PAUD, Pemberian Apresiasi GTK PAUD dan PNF, Pemilihan Guru Berprestasi PAUD. 6. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik DIKDAS, Penilaian Angka Kredit Guru DIKDAS, Pemilihan PTK Berprestasi. 7. Pendampingan calon guru penggerak
2	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Meningkatnya pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	1. Peningkatan Cagar Budaya yang terigistrasi secara Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TIM Ahli Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pengenalan Cagar Budaya, Pelestarian Kota Pusaka
			2. Peningkatan Pelestarian Objek Pemanusiaan Kebudayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Festival dan Gelar Seni Budaya, Pembentukan Lembaga Adat dan Dewan Kesenian, Pawai Budaya dan Gelar Seni, Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara, Melakukan Kajian Seni 2. Penyelenggaraan Adat dan Tradisi Masyarakat, Lawatan Sejarah, Melakukan Kajian sejarah dan Nilai Budaya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan untuk tahun 2024-2026 disusun berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** . Adapun beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang periode Tahun 2024 – 20226 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
6. Program Pengembangan Kebudayaan;
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
8. Program Pembinaan Sejarah;
9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan uraian sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 6.1** berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)															
	Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP														
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	73,3	73,5	172.094.715.166	73,6	182.487.428.481	73,6	186.889.242.976	73,6	541.471.386.623	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	90		90		90		90		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian dokumen perencanaan , penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	68.000.000	100	78.000.000	100	73.000.000	100	219.000.000	Kasubbag PEP		
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	15.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000		60.000.000	Kasubbag PEP		
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		15.000.000	Kasubbag PEP	Kota Pangkal Pinang	
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		15.000.000	Kasubbag PEP	Kota Pangkal Pinang	
	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		45.000.000	Kasubbag PEP	Kota Pangkal Pinang	
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000		24.000.000	-	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0	-	
		1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	100	302.480.000	100	304.480.000	100	304.480.000	100	911.440.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		110	154.480.000	110	154.480.000	110	154.480.000	110	463.440.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	240.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	5	68.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	208.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.203.000.000	100	1.088.000.000	100	1.128.000.000	100	3.419.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	51.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	400.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	1.150.000.000	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	18.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	455.000.000	1	455.000.000	1	455.000.000	1	1.365.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	10.000.000	1	0	1	35.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	295.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	645.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	120.000.000		50.000.000		50.000.000	1	220.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.085.000.000	100	1.085.000.000	100	1.085.000.000	100	3.255.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	2.400.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	621.037.900	100	431.037.900	100	436.037.900	100	1.488.113.700	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	7	7	135.000.000	7	140.000.000	7	140.000.000	7	415.000.000	Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman	
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	8	45.000.000	8	50.000.000	8	55.000.000	8	150.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	321.037.900	1	121.037.900	1	121.037.900	1	563.113.700	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	360.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100	44.633.695.800	100	37.650.296.981	100	37.862.796.981	100	120.146.789.762	-	
				Capaian SPM Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	84	100		100		100		100		-	
				Capaian SPM Pendidikan PAUD (Dengan Satuan:%)	45	100		100		100		100		-	
				Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan). (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	1,86	1,88	28.250.623.200	1,90	24.856.623.200	1,92	24.474.623.200	1,92	77.581.869.600	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	
				Rata-rata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	1,61	1,88		1,90		1,92		1,73		Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi B (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas	
				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (Dengan Satuan:%)	63	66		68		71		71		Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas	
				Persentase guru sekolah dasar yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	86	86		87		87		87		Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)			0		0	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	Sub Koordinator PTK DIKDAS	Kota Pangkal Pinang
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		4	1.800.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	3.600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)		5	1.500.000.000	4	1.200.000.000	3	900.000.000	3	3.600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		10	2.657.000.000	7	1.400.000.000	5	1.000.000.000	5	5.057.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		60	3.672.000.000	50	3.060.000.000	40	2.448.000.000	40	9.180.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)		500	200.000.000	550	250.000.000	600	250.000.000	600	700.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	500	600	500.000.000	650	600.000.000	700	600.000.000	700	1.700.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		20	2.500.000.000	15	1.875.000.000	10	1.250.000.000	10	5.625.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	300.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	900	1100	150.000.000	1100	200.000.000	1100	250.000.000	1100	600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)		548	14.136.523.200	548	14.136.523.200	548	14.136.523.200	548	42.409.569.600	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)		132	910.000.000	132	1.000.000.000	132	1.090.000.000	132	3.000.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	86	90	100.000	90	100.000	90	100.000	90	300.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	86	90	75.000.000	90	85.000.000	90	100.000.000	88	260.000.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	1,78	1,79	11.302.788.800	1,8	7.669.789.981	1,81	8.049.289.981	1,81	27.021.868.762	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	
				Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	90	90		90		90		90		Sub Koordinator PTK DIKDAS	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	2	2,1		2,2		2,3		2,3		Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi B (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas	
				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama (Dengan Satuan:%)	91	91		91		91		91		Sub Koordinator PTK DIKDAS	
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)		3	2.160.000.000	3	1.584.000.000	3	1.656.000.000	3	5.400.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		2	400.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	2	800.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		2	370.000.000	2	168.432.836	2	168.432.836	2	706.865.672	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)		5	1.250.000.000	4	227.068.345	3	227.068.345	3	1.704.136.690	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)		3	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	1.080.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		30	1.950.000.000	20	65.000.000	15	130.000.000	15	2.145.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		300	150.000.000	400	175.000.000	500	200.000.000	500	525.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	275	400	375.000.000	450	437.500.000	450	500.000.000	300	1.312.500.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Dengan Satuan:Peserta Didik)		26	30.000.000	26	35.000.000	26	35.000.000	26	100.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		26	30.000.000	26	35.000.000	26	35.000.000	26	100.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	324	405	200.000.000	405	250.000.000	405	300.000.000	405	750.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dengan Satuan:Orang)		132	3.292.688.800	132	3.292.688.800	132	3.292.688.800	132	9.878.066.400	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	80	80	735.000.000	80	840.000.000	80	945.000.000	80	2.520.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	24	25	100.000	26	100.000	27	100.000	27	300.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	68	68	4.147.183.800	68	4.173.783.800	68	4.368.783.800	68	12.689.751.400	Sub Koordinator PAUD	
				Angka Melanjutkan Siswa PAUD (Dengan Satuan:%)	50	50		50		50		50		Sub Koordinator PAUD	
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C (Dengan Satuan:%)	73	74		75		76		76		Sub Koordinator Kelembagaan dan SAPRAS PAUD & PNF	
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)		2	582.351.000	2	582.351.000	2	582.351.000	2	1.747.053.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)		1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	360.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)		1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	360.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)		1	120.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	410.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)		432	280.800.000	432	302.400.000	432	302.400.000	432	885.600.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		112	60.000.000	112	70.000.000	112	80.000.000	112	210.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Dengan Satuan:Orang)		582	2.333.932.800	582	2.333.932.800	582	2.333.932.800	582	7.001.798.400	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)		80	180.000.000	80	200.000.000	80	220.000.000	80	600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		112	65.000.000	112	75.000.000	112	85.000.000	112	225.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)		112	100.000	112	100.000	112	100.000	112	300.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dengan Satuan:Orang)		112	25.000.000	112	30.000.000	112	35.000.000	112	90.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang mendapatkan Minimal Akreditasi C (Dengan Satuan:%)	78	78	933.100.000	78	950.100.000	78	970.100.000	78	2.853.300.000	Sub Koordinator Kelembagaan dan SAPRAS PAUD & PNF	
		1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	140	100	63.000.000	110	70.000.000	115	75.000.000	120	208.000.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Dengan Satuan:Peserta Didik)	493	493	465.000.000	493	465.000.000	493	470.000.000	493	1.400.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	8	9	60.000.000	9	70.000.000	9	80.000.000	9	210.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	8	9	45.000.000	9	45.000.000	9	45.000.000	9	135.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	8	9	100.000	9	100.000	9	100.000	9	300.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:%)	100	100	50.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	190.000.000	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	90	90	50.000.000	90	65.000.000	90	75.000.000	90	190.000.000	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	
		1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Orang)	90	90	50.000.000	90	65.000.000	90	75.000.000	90	190.000.000	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	Kota Pangkal Pinang
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	87	87	400.000.000	88	450.000.000	88	450.000.000	88	1.300.000.000	-	
				Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	52	52		52		52		52		-	
				Rasio Pengawas dan Penilik PAUD (Dengan Satuan:%)	10	11		11		12		12		-	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan pendidik jenjang pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	77	79	400.000.000	80	450.000.000	83	450.000.000	83	1.300.000.000	Sub Koordinator Data, Teknologi dan Informasi & Komunikasi	
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	750.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	550.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%)	100	100	145.000.000	100	160.000.000	100	215.000.000	100	520.000.000	-	
				Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%)	82	84		86		92		92,37		-	
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional satuan pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	75.000.000	100	90.000.000	100	125.000.000	100	290.000.000	Sub Koordinator PTK DIKDAS	
		1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	185.000.000	-	
		1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	105.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Dengan Satuan:%)	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	230.000.000	Sub Koordinator Kelembagaan dan SAPRAS PAUD & PNF	
		1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	160.000.000	-	
		1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	70.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda															
	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda														
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)	40	50	575.000.000	60	575.000.000	70	485.000.000	70	1.635.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sumber daya kebudayaan daerah kota pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	4	5	250.000.000	6	250.000.000	7	250.000.000	7	750.000.000	-	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestariaian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	85.000.000	100	435.000.000	Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman	
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	100%	7	100.000.000	7	100.000.000	7	10.000.000	7	210.000.000	-	
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi	
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	150.000.000	-	
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	22	42	50.000.000	42	50.000.000	42	50.000.000	42	150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Dengan Satuan:Unit)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Jumlah Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang yang Dikembangkan (Dengan Satuan:%)	26	36	150.000.000	43	150.000.000	53	150.000.000	53	450.000.000	-	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pembinaan SDM Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Dengan Satuan:Orang)		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Dengan Satuan:Sertifikat)		50	50.000.000	65	50.000.000	75	50.000.000	75	150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)		1	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	150.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	20	40	85.871.195	60	85.871.195	80	85.871.195	80	257.613.585	-	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (S a t u) D a e r a h Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	85.871.195	100	85.871.195	100	85.871.195	100	257.613.585	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi	
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Dengan Satuan:Orang)	65	100	24.800.000	100	24.800.000	100	24.800.000	100	74.400.000	-	
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Dengan Satuan:Unit)	75	75	61.071.195	75	61.071.195	75	61.071.195	75	183.213.585	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola (Dengan Satuan:%)	61	70	928.110.950	80	978.110.950	89	928.110.950	89	2.834.332.850	-	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) kota pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	28	10	529.999.800	10	529.999.800	10	529.999.800	10	1.589.999.400	Sub Koordinator CagarB u d a y a dan Permuseumann	
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Dengan Satuan:Objek)	10	5	264.999.950	5	264.999.950	5	264.999.950	5	794.999.850	-	
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	28	10	264.999.850	10	264.999.850	10	264.999.850	10	794.999.550	-	Kota Pangkal Pinang
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	100	398.111.150	100	448.111.150	100	398.111.150	100	1.244.333.450	Sub Koordinator CagarB u d a y a dan Permuseumann	
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)	3	3	248.111.150	4	248.111.150	5	248.111.150	5	744.333.450	-	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mendukung salah satu tujuan Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Perubahan RPD Kota Pangkalpinang yaitu **"Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesetaraan Gender"**, dengan indikator capaian yaitu **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"**. Salah satu sasaran Kota Pangkalpinang yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah **"Meningkatnya Kualitas Pendidikan"**, melalui indikator sasaran **"Indeks Pendidikan"**. Untuk mendukung pencapaian tersebut, ditetapkanlah arah kebijakan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola /Manajemen Pendidikan;
2. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik;
3. Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Budaya.

Beberapa arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibagi ke dalam dua urusan yaitu **Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan**.

Untuk **Urusan Pendidikan, Tujuan Perangkat Daerah** yang ditetapkan adalah **"Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah"**, dengan indikator berupa **"Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah"**. **Sasaran** yang diharapkan dapat tercapai adalah **"Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar"**, dengan indikator **APS SD dan APM SMP**.

Sementara untuk **Urusan Kebudayaan, Tujuan Perangkat Daerah** yang ditetapkan adalah **"Melindungi dan Melestarikan Budaya Benda dan Tak Benda"**, dengan indikator berupa "Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda". Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai adalah "Meningkatnya Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda", dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Cagar Budaya yang Terregistrasi Secara Nasional;
2. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan.

Gambaran singkat rencana pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan di atas diuraikan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Nilai	78,57	79,89	80,31	80,72	80,72	KEPALA DAERAH
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	0,708	0,711	0,712	0,714	0,714	KEPALA DAERAH
Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,27	10,33	10,36	10,39	10,39	Ka DIKBUD
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,17	13,2	13,21	13,22	13,22	Ka DIKBUD
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP		APS SD	%	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0	Ka DIKBUD
		APS SMP	%	98,90	90,00	90,20	90,25	90,25	Ka DIKBUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,3	73,4	73,5	73,6	73,6	Sekretaris DIKBUD
		Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah	Nilai	NA	90	90	90	90	Sekretaris DIKBUD
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	dokumen	2	2	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA_SKPD	dokumen	1	1	1	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	3	3		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	laporan	2	2	2	2		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	1.109	1.157	1.157	1.157	1.157	
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	1	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	1	1	1	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	dokumen	2	2	2	2	2	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1	1	1	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	%	100	100	100	100	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	-	1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKP	dokumen	-	1	1	1	1	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	100	100	100	100	100	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	paket	-	220	110	110	110	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	1	1	1	1	1	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	-	5	5	5	5	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Berbasis Manual/Dan atau TIK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	1	1	1	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia	paket	1	1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	paket	1	1	1	1	1	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	1	1	1	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	laporan	1	1	1	1	1	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKP	dokumen	1	1	1	1	1	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	-	1	1	1	1	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit	-	1	1	1	1	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (pembuatan dapur Umum dan Ruangan Arsip)	unit	-	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	1	1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	1	1	1	1	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1	1	1	1	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	unit	1	1	1	1	1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	1	1	1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi(pemeliharaan Parkir kendaraan)	unit	1	1	1	1	1	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	%	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PEMBINAAN DIKDAS
		Capaian SPM Pendidikan Dasar	%	84%	100%	100%	100%	100%	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	Meningkatnya Akses Pendidikan PAUD dan NON FORMAL	Capaian SPM Pendidikan PAUD	%	45%	100%	100%	100%	100%	KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF
		Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).	%	100	100	100	100	100	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terkelolanya Pendidikan Dasar di Kota Pangkalpinang	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,86	1,88	1,90	1,92	1,92	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	1,61	1,68	1,70	1,73	1,73	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
		Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasi Saprasi Dikdas
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	63%	66%	68%	71%	71%	Kasi Kesiswaan
		Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	%	86%	86%	87%	87%	87%	Kasi GTK Dikdas
Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Yang Dibangun	ruang		0	0	2	2	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit		4	2	2	2	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	ruang		5	4	3	3	
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terrehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	unit		10	7	5	5	
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	paket		60	50	40	40	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	unit	-	500	550	600	600	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	500	600	650	700	700	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	paket		20	15	10	10	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian	Satuan Pendidikan		90	90	90	90	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan pendidikan dasar siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan		90	90	90	90	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	peserta didik	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	orang		548	548	548	548	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang		132	132	132	132	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksanannya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	86	88	90	90	90	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya kapasitas tenaga pengelola dana BOS sekolah dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	86	88	90	90	90	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	XXX	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	orang		50	50	50	50	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	XXX	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	dokumen		1	1	1	1	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	XXX	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	dokumen		2	2	2	2	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	XXX	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang		224	224	224	224	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pangkalpinang	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,78	1,79	1,8	1,81	1,81	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
		Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasi Saprasi Dikdas
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama	%	91%	91%	91%	91%	91%	Kasi Kesiswaan
		Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV	%	90%	90%	91%	91%	91%	Kasi GTK Dikdas
Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Yang Dibangun	ruang		3	3	3	3	
Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Terbangun	unit		2	1	2	2	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	unit		2	2	2	2	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	ruang kelas sekolah yang terrehabilitasi sedang/berat	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	ruang		5	4	3	3	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terrehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang telah Direhabilitasi sedang/berat	unit		3	3	3	3	
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	paket		30	20	15	15	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket	-	300	400	500	500	-
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian	Satuan Pendidikan		26	26	26	26	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Satuan pendidikan menengah pertama siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	jumlah satuan pendidikan menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan		26	26	26	26	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	orang		132	132	132	132	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	275	300	400	450	450	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	peserta didik	324	405	405	405	405	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Mendapat Peningkatan kompetensi dan kualifikasi	orang	80	80	80	80	80	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksanannya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	24	25	26	27	27	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	XXX	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	orang		50	50	50	50	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	XXX	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	dokumen		1	1	1	1	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	XXX	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	dokumen		1	1	1	1	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	XXX	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		105	105	105	105	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	73%	74%	75%	76%	76%	Kasi Saprass Paud dan PNF
		Angka melanjutkan siswa PAUD	%	50%	50%	50%	50%	50%	Kasi PAUD
		Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV	%	68%	68%	68%	68%	68%	Kasi GTK PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang terrehabilitasi sedang/berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi sedang/berat	unit		2	2	2	2	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terrehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat	Unit		1	1	1	1	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang mendapat pemeliharaan	Unit		1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	paket		1	1	1	1	
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	paket		1	1	1	1	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya personil peserta didik PAUD diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	peserta didik		432	432	432	432	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan pendidikan PAUD siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan		112	112	112	112	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersedia bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	orang		58	58	58	582	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang		80	80	80	80	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		112	112	112	112	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		112	112	112	112	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	paket		1	1	1	1	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang		112	112	112	112	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	XXX	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		112	112	112	112	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	78%	78%	78%	78%	78%	Kasi Supras Paud dan PNF
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terrehabilitasi sedang/berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	1	1	1	1	1	
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Mebel pendidikan non formal/kesetaraan yang tersedia	Jumlah mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tersedia	paket	1	1	1	1	1	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	peserta didik	140	100	110	115	120	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya proses belajar non formal/kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	peserta didik	493	493	493	493	493	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	8	9	9	9	9	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	lembaga	8	9	9	9	9	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga nonformal/kesetaraan yang mengelola Dana BOP	lembaga	8	9	9	9	9	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Berkembangnya kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	KABID PEMBINAAN DIKDAS
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Ditetapkannya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar untuk satuan pendidikan negeri dan swasta	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	dokumen	90	90	90	90	90	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	orang	90	90	90	90	90	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	%	87%	87%	88%	88%	88%	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN
		Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	52%	52%	52%	52%	52%	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN
		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	%	10%	11%	11%	12%	12%	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar	persen	77%	79%	80%	83%	83%	Kasi Data dan TIK

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	1	1	1	1	1	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	laporan	1	1	1	1	1	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terkendalinya Operasional Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional	%	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PEMBINAAN DIKDAS
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	%	82%	84%	86%	92%	92,37%	KABID PEMBINAAN PAUD dan PNF
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terkelolanya Perizinan Pendidikan Dasar	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	Kasi Saprasi Dikdas
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	dokumen	1	1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Terkelolanya Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal	%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	Kasi Sapras Paud dan PNF
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	dokumen	1	1	1	1	1	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	
		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA							KEPALA DAERAH
		INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	0,708	0,711	0,712	0,714	0,714	KEPALA DAERAH
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka DIKBUD
		Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	%	61%	70%	80%	91%	91%	Ka DIKBUD

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	%	60%	70%	80%	90%	90%	Ka DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Upaya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Daerah Kota Pangkalpinang	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan	Persen	40	50	60	70	70	KABID KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Kota Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	5	6	7	7	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	100	100	100	100	
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telestarinya Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	100%	7	7	7	7	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	1	1	1	1	1	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang	Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	3	3	3	3	3	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	22	42	42	42	42	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	Unit	25	25	25	25	25	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Upaya Pengembangan Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang	Persentase Jumlah Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang yang Dikembangkan	Persen	26%	36%	43%	53%	53%	KABID KEBUDAYAAN
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang	Persentase Pembinaan SDM Kesenian Tradisional Kota Pangkalpinang	%	N/A	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	0	100	100	100	100	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mengikuti proses peningkatan kualitas dan Standarisasinya	Sertifikat	0	50	65	75	75	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	1	2	3	3	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya Upaya Pembinaan SDM dan Objek Sejarah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan	Persen	20	40	60	80	80	KABID KEBUDAYAAN
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pembinaan sejarah lokal Kota Pangkalpinang	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan	Orang	65	100	100	100	100	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	75	75	75	75	75	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	0	1	1	1	1	

Tujuan /Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan dan dikelola	Persen	61%	70%	80%	89%	89%	KABID KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan dan Pemingkatan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang	%	28	10	10	10	10	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan	Objek	10	5	5	5	5	
Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	28	10	10	10	10	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	
Perlindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	3	3	4	5	5	
Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	3	3	4	5	5	
Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0	1	1	2	2	

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang setiap tahunnya. Di dalamnya memuat hal – hal penting terkait penajaman kembali arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, sinkronisasi kebijakan kepala perangkat daerah dengan kebijakan nasional, penajaman kembali dalam hal program, indikator, pagu dan target Tahun 2024-2026 serta penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPD.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa kaidah pelaksanaan Penyusunan Renstra yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra berlaku untuk tahun 2024 – 2026, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.